



36 Daftar Calon Sementara Anggota DPR RI Yang Diragukan Komitmen Anti Korupsinya



Wajah Parlement
2009-2014

Kegaduhan dari Parlemen

1. Rencana Pembangunan Gedung Baru DPR Rp 1,16 T
2. Renovasi Ruangan Badan Anggaran Rp 20 M
3. Angket CENTURY yang basa-basi dan tanpa ujung
4. Study Banding ke luar negeri
5. Seleksi pejabat publik yang terlambat (Seleksi KY, Seleksi KIP)
6. Usulan dana aspirasi sebesar Rp. 8,4 T

8 Kasus Besar Korupsi

DPR Periode 2009-2014

No	Kasus Korupsi	Aktor	Putusan
1	Dana Percepatan Infratraktur Daerah (DIPD)	Wa Ode Nurhayati	4 tahun penjara
2	Wisma Atlet	Nazaruddin	7 Tahun penjara
3	Proyek Kemendiknas	Angelina Sondakh	4,5 tahun Penjara
4	Pengadaan Alquran dan Lab	Zulkarnain Djabar	15 tahun penjara
5	Suap Pemilihan Deputi Senior BI	Panda Nababan	17 bulan
6	Pengadaan Impor Sapi	Luthfi Hasan Ishaq	Penuntutan
7	PLTU Tarahan	Emir Moeis	Penyidikan
8	Gratifikasi	Anas Urbaningrum	Penyidikan



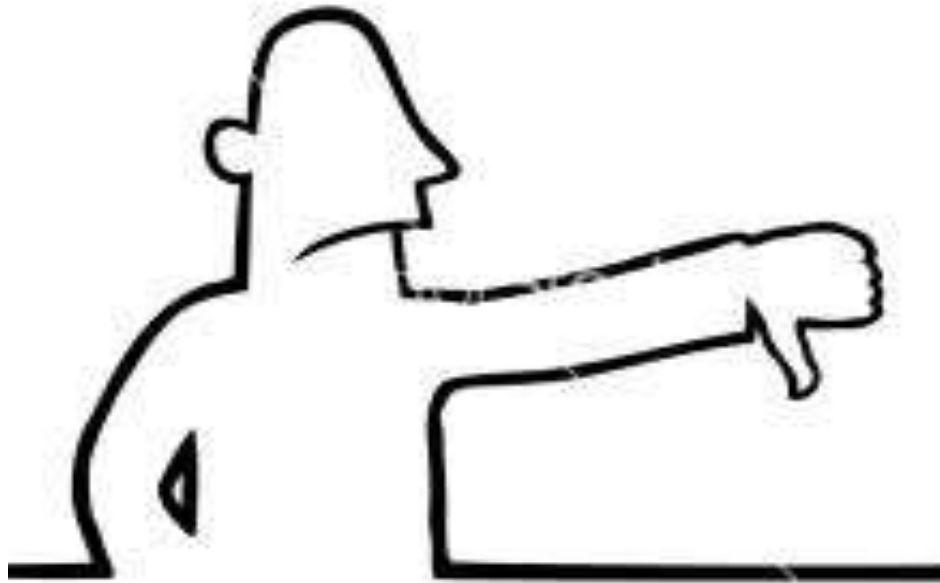
2000 transaksi mencurigakan berdasarkan temuan PPATK

Serangan Politisi Terhadap Pemberantasan Korupsi

1. Revisi Undang-Undang KPK yang mengamputasi kewenangan lembaga tersebut
2. Pembintangan dana untuk pembangunan Gedung KPK
3. Pengurangan anggaran KPK
4. Intervensi terhadap proses pemindahan persidangan Walikota Semarang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung
5. Menolak moratorium remisi bagi koruptor
6. Ancaman pemotongan anggaran KPK oleh DPR

Rapor Merah Keuangan Partai

No	Partai	Proses Uji Informasi						Keterangan
		Permintaan Informasi	Keberatan	Mediasi			Ajudikasi	
				1	2	3		
1	Partai GOLKAR	Tidak merespon	Tidak merespon	Datang tapi tidak membawa membawa laporan	Datang, memberikan laporan	-	-	Laporan yang diberikan hanya laporan keuangan dari APBN 2011
2	Partai DEMOKRAT	Tidak merespon	Tidak merespon	Tidak datang	Datang tapi tidak membawa laporan	Datang, tidak membawa laporan	Kalah	Tidak menjalankan putusan KI. Tidak bersedia memberi laporan
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	Tidak merespon	Tidak merespon	Tidak Datang	Datang, bersedia akan memberikan tapi dalam batas waktu yang disepakati tidak menyerahkan laporan		Kalah	Menjalankan putusan KI
4	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Tidak merespon	Tidak merespon	Datang dan memberi laporan				Laporan yang diberikan laporan keuangan konsolidasi
5	Partai HANURA	Tidak merespon	Tidak merespon	Tidak datang	Datang, menyatakan akan membereskan dan mengaudit laporan keuangan. Meminta waktu 5 bulan			Sampai saat ini belum memberi laporan keuangan
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	Tidak merespon	Tidak merespon	Tidak datang	Tidak datang		Kalah	Menjalankan putusan KI, memberikan laporan
7	PDI Perjuangan	Tidak merespon	Tidak merespon	Tidak datang	Tidak datang	Datang, memberilaporan keuangan APBN		Laporan keuangan yang diberikan hanya dari APBN
8	Partai GERINDRA	Tidak merespon	Tidak merespon	Tidak datang	Tidak datang,	Tidak datang	Datang, belum bisa memberikan karena laporam keuangan tengah diaudit	Sampai hari ini belum berikan laporan
9	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Tidak merespon	Tidak merespon	Tidak datang	Datang, memenuhi permintaan			Laporan yang diberikan belum diaudit



36 DCS Yang Diragukan Komitmen
Anti Korupsinya

5 (lima) Indikator Penilaian

1. Politisi yang namanya pernah disebut dalam keterangan saksi atau dakwaan JPU terlibat serta atau turut menerima sejumlah uang dalam sebuah kasus korupsi
2. Politisi bekas terpidana kasus korupsi
3. Politis yang pernah dijatuhi sanksi atau terbukti melanggar etika dalam pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR
4. Politisi yang mengeluarkan pernyataan di Media yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi
5. Politisi yang mendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi memangkas dan melemahkan kewenangan lembaga tersebut

DCS Yang Diragukan Komitmen Anti Korupsinya

No	Nama	Fraksi/ Partai Pengusung	Komisi	Kasus/ persoalan
1	Aziz Syamsuddin	Golkar	3	Disebut oleh Saksi (AKBP Thedy Rusmawan) dalam persidangan kasus simulator (28/5/2013) menerima uang untuk memperlancar proyek simulator SIM
2	Desmond J Mahesa	Gerindra	3	Disebut oleh Saksi (AKBP Thedy Rusmawan) dalam persidangan kasus simulator (28/5/2013) menerima uang untuk memperlancar proyek simulator SIM
3	Herman Hery	PDIP	3	Disebut oleh Saksi (AKBP Thedy Rusmawan) dalam persidangan kasus simulator (28/5/2013) menerima uang untuk memperlancar proyek simulator SIM
4	Bambang Soesatyo	Golkar	3	Disebut oleh Saksi (AKBP Thedy Rusmawan) dalam persidangan kasus simulator (28/5/2013) menerima uang untuk memperlancar proyek simulator SIM
5	Edhie Baskoro Yudhoyono	Demokrat	-	Laporan dugaan pencemaran nama baik oleh Ibas kepada Yulianis dinilai oleh LPSK menghambat pemberantasan korupsi
6	Mahyudin	Demokrat	9	Disebut oleh saksi Mindo Rosalina M dalam persidangan (16/1/1012) sebagai "Pak Ketua" yang menerima sejumlah uang dari pembahasan Wisma Atlet

Lanjutan

7	I Wayan Koster	PDIP	10	Disebut oleh Saksi Lutfi Ardiansyah dalam persidangan tipikor (27/1/2012) menerima uang sebesar 5 M dari Group Permain
8	Said Abdullah	PDIP	8	Disebut oleh Yulianis dalam persidangan Tipikor (4/10/2012) turut serta dalam menggiring sejumlah proyek bersama group permai
9	Mirwan Amir	Demokrat	1	Saksi Mindo Rosalina M dalam persidangan menyebutkan peran ybs sebagai "Ketua Besar" yang menerima uang dari proyek Wisma Atlet
10	Abdul Kadir Karding	PKB	6	Disebut oleh Yulianis dalam persidangan Tipikor (4/10/2012) turut serta dalam menggiring sejumlah proyek bersama group permai
11	Olly Dondokambey	PDIP	11	Disebut oleh Yulianis dalam persidangan Tipikor (4/10/2012) turut serta dalam menggiring sejumlah proyek bersama group permai
12	Jhonny Allen Marbun	Demokrat	7	Idisebut oleh Abdul Hadi Jamal (tersangka kasus korupsi Pembangunan Dermaga dan Bandara Indonesia Timur) menerima uang 1 M dalam proyek yang sama

Lanjutan

13	Ahmad Yani	PPP	3	Mendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi melemahkan kewenangan lembaga tersebut .
14	Syarifuddin Suding	Hanura	3	Mendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi melemahkan kewenangan lembaga tersebut
15	Nasir Djamil	PKS	3	Mendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi melemahkan kewenangan lembaga tersebut
16	Idris Laena	Golkar	1	Melakukan pelanggaran etika (sedang) dalam kasus permintaan barang atau upeti kepada BUMN
17	Achsanul Qosasih	Demokrat	11	Melakukan pelanggaran etika ringan dalam kasus permintaan barang atau upeti kepada BUMN
18	Zulkifliemansyah	PKS	7	Melakukan pelanggaran etika ringan dalam kasus permintaan barang atau upeti kepada BUMN
19	Ignatius Mulyono	Demokrat	2	Membantu pengurusan sertifikat Hambalang atas permintaan Anas Urbaningrum
20	Nudirman Munir	Golkar	3	Mendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi melemahkan kewenangan lembaga tersebut

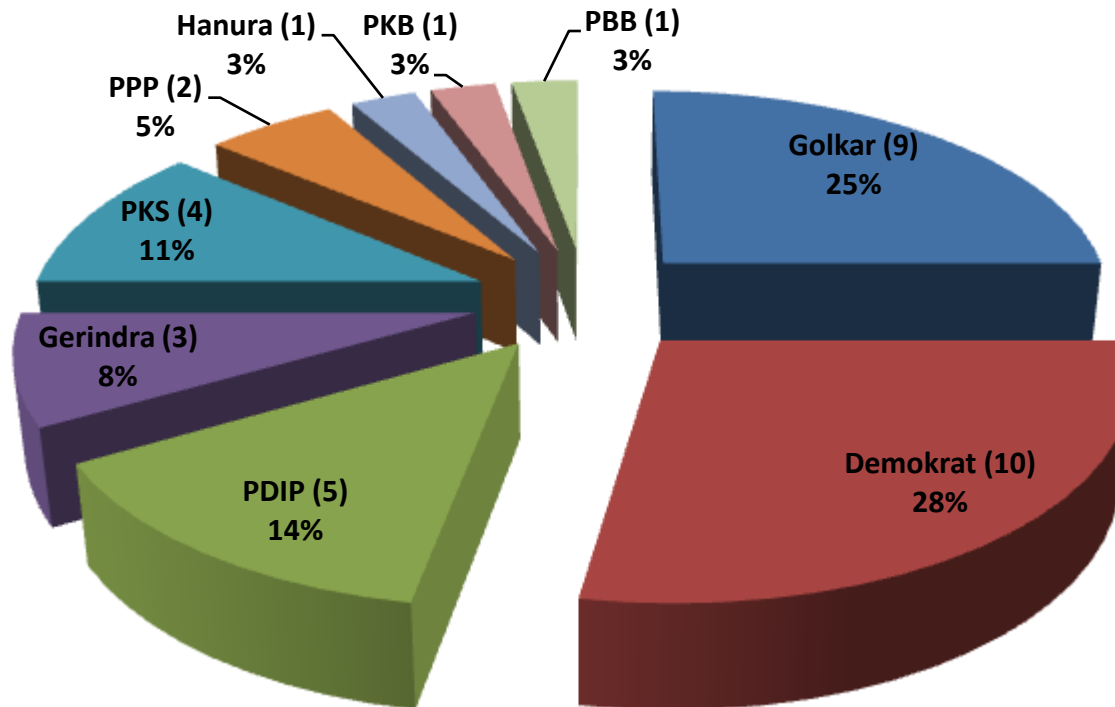
Lanjutan

21	Setya Novanto	Golkar	3	Kesaksian Lukman Abbas di Pengadilan Tipikor Pekanbaru mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar Muzakir setelah pertemuan dengan Setya Novanto
22	Kahar Muzakir	Golkar	10	Kesaksian Lukman Abbas di Pengadilan Tipikor Pekanbaru mengaku menyerahkan uang 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar Muzakir
23	Adang Darajatun	PKS	3	Tidak bersedia menyampaikan kepada KPK keberadaan istrinya (Nunun Nurbaiti) saat menjadi buronan kasus <i>Travel Cheque</i>
24	Fahri Hamzah	PKS	7	Mendorong pembubaran KPK
25	Ribka Tjiptaning	PDIP	9	Dijatuhi sanksi oleh Badan Kehormatan DPR berupa larangan memimpin rapat panitia khusus atau panitia kerja di DPR terkait kasus ayat tembakau yang hilang dalam UU Kesehatan
26	Pius Lustrilanang	Gerindra	9	Ngotot dalam pembangunan gedung baru dpr
27	Melchiar Marcus Mekeng	Golkar	11	Disebut sebagai "Ketua Besar" dalam BBM antara Mindo Rosalina Manulang dan Anggelina Sondakh dalam kasus Wisma Atlet
28	Muhammad Nasir	Demokrat	11	Audit BPK menyebut nama Muhammad Nasir termaktub dalam akta kepemilikan PT. Anugerah Nusantara.

Lanjutan

29	Vonny Anneke Panambunan	Gerindra	Mantan Bupati Minahas a Utara	Mantan terpidana kasus korupsi bandara Loa Kulu di Kutai Kartanegara. Vonis 1,5 tahun penjara (mei 2008)
30	Nazaruddin Sjamsuddin	PBB	Mantan Ketua KPU	Terpidana kasus korupsi dana taktis KPU dan Asuransi
31	Sutan Batugana	Demokrat	7	Disebut oleh JPU menerima uang dalam kasus Solar Home System (SHS) dan hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa Kosasih Abas
32	Marzuki Ali	Demokrat	Ketua DPR	Pernah menyampaikan wacana pembubaran KPK
33	Priyo Budi Santoso	Golkar	Wakil Ketua DPR	Nama Priyo Budi S masuk dalam tuntutan JPU atas kasus Pengadaan Alquran dan Laboratorium yang menyeret Dendi Prasetya dan Zulkarnain Djabar
34	Max sopacua	Demokrat	1	Disebut dalam surat dakwaan untuk terdakwa bekas Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Sjafii Ahmad di Pengadilan Tipikor, Senin (29/11/2010) Menerima uang dari proyek pengadaan Alkes di Depkes sebesar 45 Juta
35	Charles Jonas Mesang	Golkar	9	Disebut dalam surat dakwaan untuk terdakwa bekas Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan Sjafii Ahmad di Pengadilan Tipikor, Senin (29/11/2010) Menerima uang dari proyek pengadaan Alkes di Depkes sebesar 90 juta
36	H Achmad Farial	PPP	7	Disebut oleh JPU menerima uang dalam kasus Solar Home System (SHS) dan hal tersebut juga diakui oleh Terdakwa Kosasih Abas

Berdasarkan Asal Partai



Catatan

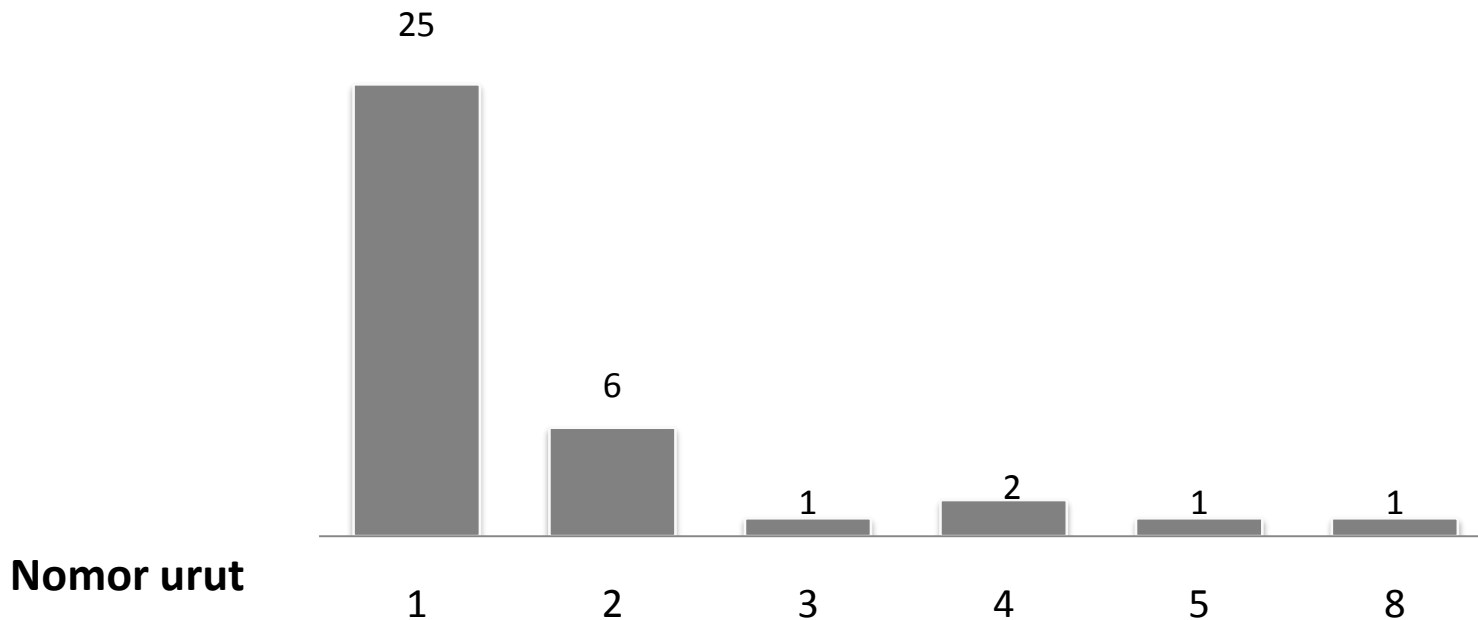
1. DCS dari partai Demokrat menduduki peringkat pertama (10) orang yang diragukan komitmen pemberantasan korupsinya.
2. Posisi kedua Partai Golkar dengan jumlah 9 orang

Berdasarkan Dapil

Dapil	Jumlah	Dapil	Jumlah
NTT II	3	Bali	1
Jabar V	3	Jatim I	1
Sumsel	3	Jateng VI	1
Aceh II	2	Sumut	1
Sulut	2	Aceh I	1
Banten II	2	Sumbar 2	1
Riau II	2	NTB	1
Jakarta 3	2	Jabar IV	1
NTT II	2	Jabar III	1
Jatim VII	1	Sumut	1
Lampung II	1	Jatim IX	1
Jateng VII	1	Jateng X	1

Berdasarkan Nomor Urut

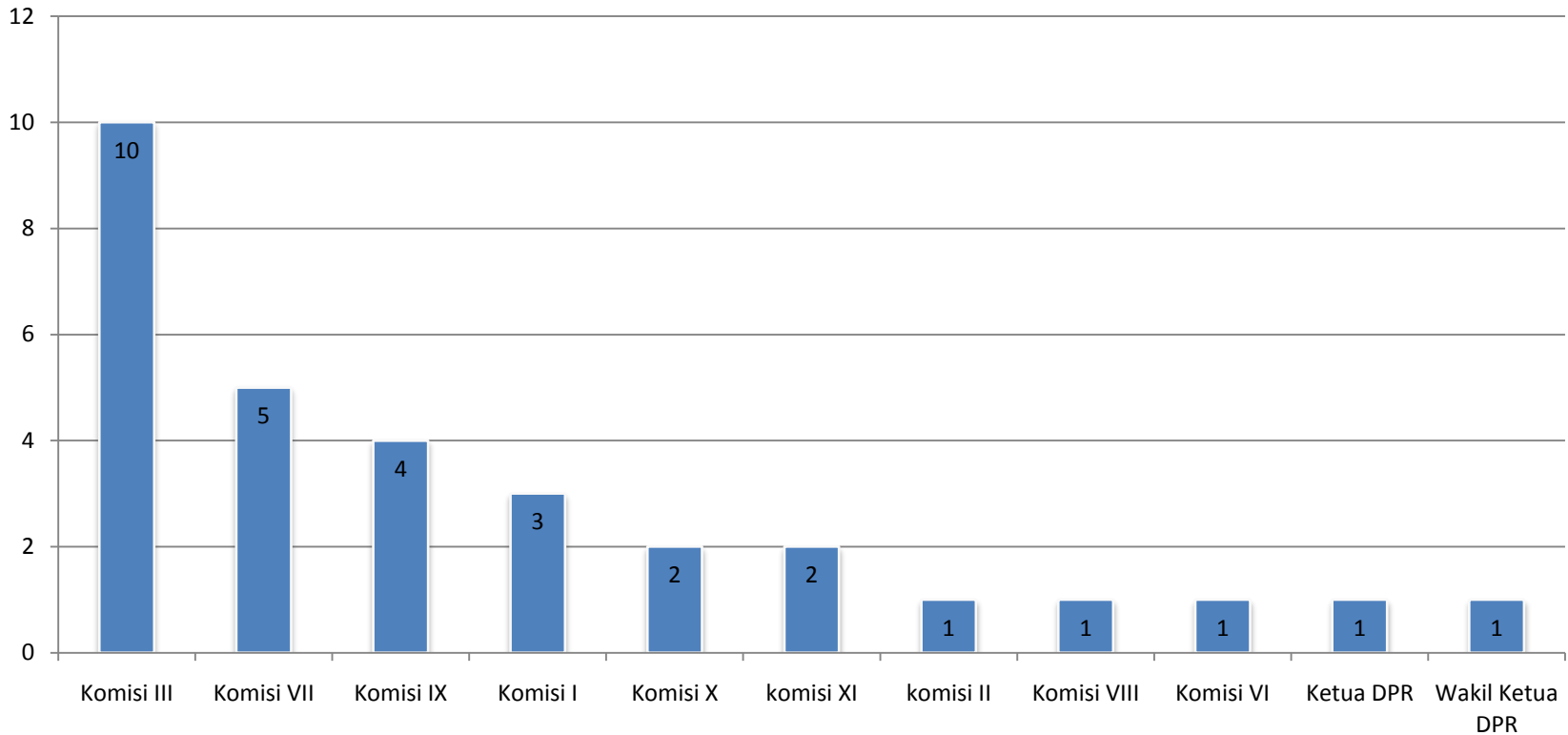
Berdasarkan Nomor Urut



Catatan:

1. Mayoritas partai justru memberikan nomor urut 1 (satu) Kepada DCS yang diragukan komitmen anti korupsinya yakni sebanyak 25 orang
2. Komitmen pemberantasan korupsi partai politik sangat rendah

Berdasarkan Komisi DPR RI



DCS yang diragukan komitmen anti korupsinya paling banyak berasal dari komisi III DPR RI yakni sebanyak 10 orang

Kesimpulan

- Sebanyak **36** DCS DPR RI diragukan komitmen anti korupsinya, dan **34** diantaranya merupakan “wajah lama”.
- DCS dari partai Demokrat menduduki peringkat pertama (10 orang) yang diragukan komitmen pemberantasan korupsinya, menyusul Partai Golkar (9 orang) dan PDIP (5 orang)
- Komitmen pemberantasan korupsi partai politik sangat buruk, karena caleg-caleg yang diragukan komitmen pemberantasan korupsinya justru mendapat “keistimewaan” karena mendapat nomor urut paling atas yakni sebanyak 25 orang
- 36 DCS tersebut tersebar di 24 daerah pemilihan
- DCS yang diragukan komitmen pemberantasan korupsinya paling banyak berasal dari Komisi III (Bidang Hukum) yakni sebanyak 10 orang.

Terimakasih

Koalisi Pemilu

ICW - JPPR